

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan SKPD**

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi BLH DIY yaitu “Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”, ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar biaya produksi dan memperkecil keuntungan serta menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama pengendalian pencemaran air sungai dan air tanah.
2. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup manusia. Kondisi ini menyebabkan replikasi percontohan/demplot tentang pengelolaan lingkungan belum berkembang secara cepat seperti yang diharapkan.
3. Peningkatan aktifitas transportasi sebagai peningkatan aktifitas perekonomian dan bisnis memang terus diupayakan. Kondisi ini suka tidak suka menyebabkan meningkatnya pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan meningkatnya polutan udara seperti CO, NO<sub>2</sub>, HC dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat selain juga bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum di DIY terutama di Kota Yogyakarta menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama pada saat padat kendaraan pada titik-titik kemacetan dan pusat-pusat aktifitas penduduk.
4. Keterpihakan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelambagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain. Pengelolaan lingkungan hidup masih sebagai pelengkap pembangunan di daerah dan belum dijadikan arus utama pembangunan.

5. Permasalahan lingkungan di daerah perkotaan adalah pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), meningkatnya pembuangan limbah cair domestik dan *home industry* ke aliran sungai dengan tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, penyerobotan daerah sempadan sungai untuk permukiman, serta keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi ini menyebabkan tidak saja mengurangi estetika lingkungan tetapi telah mengancam pada pencemaran lingkungan.
6. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lereng tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama.
7. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun.
8. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi, sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut.
9. Pencemaran air tanah meningkat yang menyebabkan air tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi.
10. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunungapi, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, tsunami, serta kekeringan menjadi tantangan dimasa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan.
11. Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya hutan dan lahan, serta sumberdaya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisannya.
12. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
13. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak.
14. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3.
15. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### 3.2.1. Telaah Visi

Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu: “**Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiridan Sejahtera Menyongsong PeradabanBaru**”

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **lebih berkarakter** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **berbudaya** dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **maju** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah.

Tingkat kemajuan masyarakat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Kemajuan masyarakat juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan masyarakat dengan laju pertumbuhan penduduk,

termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan masyarakat diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi masyarakat menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejala yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan masyarakat dan sistem politik yang dianutnya. Bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang hak-hak warganya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Oleh karena itu Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana dengan mengedepankan semangat kerakyatan dan bukan kapitalisme. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis pada ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga perguruan tinggi harus menjadi pusat keunggulan --*center of excellence*-- yang sekaligus memiliki tiga predikat, sebagai *teaching, research and entrepreneurial university*.

Kemandirian dan kemajuan masyarakat tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya(*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas

negara tidak memasuki domain *society* secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

### **3.2.2. Telaah Misi**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.
- Misi 2: Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
- Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
- Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Badan Lingkungan Hidup DIY mengemban Misi 4 RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yaitu memantapkan prasarana dan sarana daerah, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam

menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pada misi ke empat RPJMD DIY 2012 – 2017, khususnya aspek kelestarian lingkungan merupakan fokus yang akan diwujudkan oleh BLH DIY, dengan sasaran **peningkatan kualitas lingkungan hidup (dari 2% menjadi 15,72%)** yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan, tentunya dengan melibatkan instansi sekor DIY, Intansi yang menangani Lingkungan hidup di kabupaten/kota serta partisipasi masyarakat.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Kabupaten/Kota**

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merupakan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis KLH h memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH, dan sasaran strategis terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan LH, meliputi:

- a. Penurunan beban pencemaran lingkungan;
- b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sasaran Strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Sasaran strategis terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP);
- b. Percepatan implementasi reformasi birokrasi (RB).

Outcome/Hasil Keluaran Kementerian Lingkungan Hidup ada 3 yaitu :

1. Perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan,
2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup,
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Secara substansi bahwa sasaran Renstra KLH 2010–2014, sangat relevan dan sinergis dengan sasaran Renstra BLH DIY 2012–2017 dalam mendukung pencapaian misi ke 4 RPJMD DIY Tahun 2012–2017.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029 kebijakan pengembangan prasarana lingkungan meliputi system penananganan limbah, sampah, drainase disediakan baik di kawasan perkotaaan dan pedesaan mulai dari hulu dan hilir serta lintas Kabupaten/Kota pada kawasan strategis.

Pembangunan pengelolaan air limbah terpusat untuk area pelayanan kawasan perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu untuk area pelayanan kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul dan pembangunan jaringan drainase di seluruh Kabupaten/Kota.

Untuk pola ruang wilayah DIY meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari : kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam, kawasan suaka margasatwa, dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas: . kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata;, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pendidikan tinggi, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan militer dan kepolisian.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk dapat menjaga pelestarian fungsi kawasan lindung mulai dari kawasan hulu sampai hilir agar fungsinya sebagai daerah resapan air tetap terjaga dan konservasi keanekaragaman hayati juga dapat dilestarikan. Disamping itu pengelolaan lingkungan hidup juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan kawasan budi daya agar laju degradasi fungsi lingkungan terkendali. Hal ini mengingat kawasan budidaya merupakan kawasan yang padat dengan berbagai aktifitas pertanian, peternakan, perumahan dan perekonomian.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Perumusan/ analisis isu-isu strategis lingkungan hidup DIY dilakukan dengan pendekatan ekosistem dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) ekosistem Adapun isu-isu strategis untuk masing-masing jenis ekosistem adalah sebagai berikut :

1. Ekosistem Gunung Merapi



Fenomena yang terjadi pada ekosistem Gunung Merapi yang muncul dan dijadikan permasalahan lingkungan setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi adalah:

- a. Kerusakan hutan
- b. Kerusakan Keanekaragaman Hayati
- c. Menurunnya fungsi ekologi sebagai resapan air akibat rusaknya ekosistem

2. Ekosistem perbukitan/pegunungan

Gejala umum yang terjadi pada ekosistem perbukitan/pegunungan yang muncul dan menjadi permasalahan lingkungan adalah:

- a. Kerusakan hutan
- b. Lahan kritis
- c. Ancaman Kehati
- d. Erosi tanah
- e. Tanah longsor
- f. Penambangan Galian golongan C

3. Ekosistem Lingkungan Sungai

Permasalahan lingkungan yang pada umumnya terjadi di Ekosistem Lingkungan Sungai, adalah:

- a. Debit air sungai yang tidak mantap
- b. Pembuangan Sampah
- c. Pencemaran air dari kegiatan industri
- d. Pencemaran air dari limbah domestik
- e. Pencemaran pestisida dan bahan kimia dari sektor pertanian
- f. Pencemaran bakteri coli dari aktifitas peternakan
- g. Pelanggaran sempadan Sungai

4. Ekosistem Perkotaan

Pada umumnya Permasalahan lingkungan yang terjadi di Ekosistem perkotaan, adalah:

- a. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b. Peningkatan volume sampah padat baik organik, anorganik maupaun Limbah B3
- c. Pencemaran udara terutama darai sektor transportasi
- d. Penurunan estetika lingkungan
- e. Limbah cair baik domestik maupun industri
- f. Penurunan kualitas air tanah

- g. Penurunan kuantitas air tanah
- h. Ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran Sungai yang padat penduduk

#### 5. Ekosistem Perdesaan

Gejala umum yang terjadi pada ekosistem Perdesaan yang muncul dan menjadi permasalahan lingkungan adalah:

- a. Penurunan Kualitas air tanah
- b. Penurunan kuantitas air tanah
- c. Pencemaran air tanah dan air sungai akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia dari kegiatan pertanian
- d. Alih fungsi lahan (dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian)
- e. Masih tingginya volume Sampah non organik yang belum dikelola secara baik

#### 6. Ekosistem pesisir dan pantai

Fenomena yang terjadi pada ekosistem pesisir dan pantai yang muncul dan dijadikan permasalahan lingkungan adalah:

- a. Kerusakan Gumuk Pasir
- b. Pelanggaran tata ruang/ sempadan pantai
- c. Ancaman Keanekaragaman hayati (misal: kerusakan terumbu karang, mangrov, dan vegetasi pantai)
- d. Pencemaran air laut
- e. Abrasi dan abrasi pantai
- f. Penambangan pasir pantai

#### 7. Ekosistem perbukitan Karst

Gejala umum yang terjadi pada ekosistem perbukitan karst yang muncul dan menjadi permasalahan lingkungan adalah:

- a. Kerusakan kawasan perbukitan karst akibat penambangan kapur ilegal
- b. Ancaman degradasi Keanekaragaman hayati
- c. Perubahan Bentang lahan
- d. Penurunan kuantitas air tanah
- e. Menurunnya Kualitas sabuk hijau

Sedangkan isu-isu dari aspek sosial, budaya dan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian fungsi LH masih relatif rendah
- b. Keterbatasan kapasitas pemangku kepentingan (dana, SDM, Kelembagaan) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan
- c. Kesenjangan dan keterbatasan alokasi dana APBD dalam pengelolaan LH di Kab/kota
- d. Meningkatnya tekanan penduduk terhadap lingkungan yang cenderung mengarah pada terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan
- e. Keterbatasan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- f. Kurang sinergisitas kebijakan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan LH
- g. Masih rendahnya komitmen para pengambil keputusan untuk berpihak kepada kepentingan LH